

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

Oleh

M. Fathan Mubin

NIM. 05010421009



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fathan Mubin
NIM : 05010421009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Netralitas ASN Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Lingkungan Perguruan Tinggi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 09 Mei 2024

Yang Menyatakan,



M. Fathan Mubin

NIM. 05010421009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Fathan Mubin

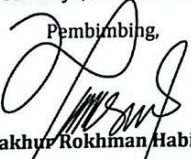
NIM : 05010421009

Judul : Netralitas ASN Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Di Lingkungan
Perguruan Tinggi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XXII/2024)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada
sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 Mei 2024

Pembimbing,


Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Fathan Mubin

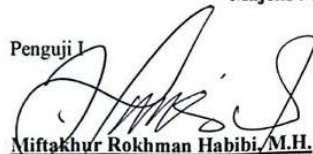
NIM. : 05010421009

Judul : Netralitas ASN dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Lingkungan Perguruan Tinggi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

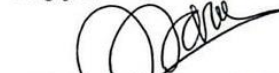
Penguji II


Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji II


Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji IV


Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 4 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. H. Sunnah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Fathan Mubir
NIM : 05010421009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : 05010421009@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Netralitas Aparatur sipil Negara Dalam Kampanye Pemilihan
Kepala daerah di Lingkungan perguruan Tinggi (Analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(M. Fathan Mubir)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Pada tahap kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terdapat pembatasan mengenai lokasi atau tempat tertentu yang diatur dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pilkada. Seiring pada perkembangannya, diajukan permohonan uji materiil terhadap penjelasan norma *a quo* oleh para Pemohon. Menurut para Pemohon, norma yang diuji ini menimbulkan kerugian konstitusional karena mencegah civitas akademika untuk menilai visi dan misi Calon Kepala Daerah dalam ranah akademik di lingkungan perguruan tinggi, sekaligus menghasilkan ketidakjelasan hukum dalam pengaturan tata cara Pilkada. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024, permohonan ini dikabulkan seluruhnya. Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dan tinjauan Fiqh *siyāsah* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 tentang uji materiil Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan kegiatan kampanye di lingkungan perguruan tinggi dengan ketentuan mendapatkan izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Putusan ini berisiko mengancam netralitas ASN karena perguruan tinggi seringkali menjadi tempat ASN beraktivitas. Apabila Pegawai ASN melanggar prinsip netralitas, maka mereka akan dikenai sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan menjalankan fungsi pengawasan Pilkada secara efektif melalui upaya pencegahan untuk meminimalisir pelanggaran, penindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, serta pengawasan ketat terhadap tahapan kampanye di tempat pendidikan dan netralitas ASN, sementara ASN diharapkan memegang teguh prinsip netralitas dan bersikap adil dalam memberikan izin penggunaan tempat pendidikan sebagai lokasi kampanye, sehingga mendukung penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	21
C. Batasan Masalah	21
D. Rumusan Masalah	22
E. Tujuan Penelitian	22
F. Manfaat Penelitian	22
G. Penelitian Terdahulu	23
H. Definisi Operasional	26
I. Metode Penelitian	29
BAB II KERANGKA TEORITIS	32
A. Teori Netralitas	32
B. Konsep Pemilihan Kepala Daerah	37
C. Aparatur Sipil Negara (ASN)	41
D. <i>Fiqh Siyāsah</i>	48
BAB III ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XXII/2024 TENTANG KAMPANYE PILKADA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI	77
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi	77
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para pemohon	77
2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>)	77
3. Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya	79
B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi	83
C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 terhadap Netralitas ASN	86
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP NETRALITAS ASN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI	101
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
Lampiran 1: Persetujuan Sidang Munaqasah	122

Lampiran 2: Kesiadaan Sebagai Pembimbing Tugas Akhir	123
Lampiran 3: Pengajuan Judul Tugas Akhir.....	124
Lampiran 4: Pengesahan Proposal Tugas Akhir	125
Lampiran 5: Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir.....	126
Lampiran 6: Kartu Rencana Studi.....	127
Lampiran 7: Transkrip Nilai	128
Lampiran 8: Kartu Mahasiswa	129
Lampiran 9: Cek Turnitin.....	130
Biografi Penulis.....	131



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Faruqi, Ismail R., and Lois Lamya Al-Faruqi. *Atlas Budaya Islam (Menjelajah Khaanah Peradaban Gemilang)*, Terj. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan, 1998.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi Terj. Bahrnun Abu Bakar Dkk.* Semarang: Toha Putra, 1986.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi Terj. Bahrnun Abu Bakar Dkk.* Semarang: Toha Putra, 1986.
- al-Mawardi, Imam. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah al-Wilayah al-Diniyyah*. Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur''an Dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- al-Tirmidzi, Imam Abi 'Isa Muhammad Ibn. *Sunan Al-Tirmidzi*. Cet. 2 Jilid 2. Kairo: Dar al-Ta'shil, 2016.
- Amirudin, and A. Zaini Bisri. *Pilkada Langsung: Problem Dan Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Asad, Muhammad. *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Batubara, Chuzaimah, Iwan, and Hawari Batubara. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Pertama. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Bisri, M. Adib, Munawir Abdul Fatah, Ahmad Warson Munawwir, and A. Mustofa Bisri. *Kamus al-Bisri: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, and Yeni Salma Barlinti. *Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Edisi pertama, Cetakan ke-6. Cimanggis, Depok: Prenadamedia Group atas kerja sama dengan Badan Penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2020.
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2003.
- Dwiputrianti, Septiana. "Netralitas Aparatur Sipil Negara." In *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, 204. Badan Pengawas Pemilu, 2019.
- Harjono. *Konstitusi sebagai rumah bangsa: pemikiran Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Joko J. Prihatmoko. *Pemilihan kepala daerah langsung: filosofi, sistem, dan problema penerapan di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terj. Ahmadie Thaha. Jakarta: Pustaka Pidaus, 2000.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* Cetakan 1. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Nizam Al-Hukm Fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi. t.t., n.d.
- Perdana, Aditya. *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Cetakan pertama. Menteng, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019.

- Perdana, Aditya. *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Cetakan pertama. Menteng, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019.
- Prasojo, Eko. *Desentralisasi & pemerintahan daerah: antara model demokrasi lokal & efisiensi struktural*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2006.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Safa'at, M. Ali, Agus Riewanto, Pan M. Faiz Kusuma W., Abdul Ghoffar, Andriani W. Novitasari, Sunny Ummul Firdaus, Bayu Dwi Anggono, Bisariyadi, Helmi Kasim, and Luthfi Widagdo Eddyono. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cet. 2. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Samuddin, Rapung. *Fiqih demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*. Cetakan pertama. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sirait, Ferdinand Eskol Tiar. "Problem Etik Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilu: Perspektif Etika Komunikasi Politik." In *Netralitas ASN: Problematika Dan Studi Kontemporer*. Cet. 1. Bantul: The Journal Publishing, 2022.
- Suharizal. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, and Abdul Aziz. *Hukum tata usaha negara & hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*. Ed. 1., cet. 1. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*. Cet. 1. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Jurnal

- Alfaruqy, Muhammad Zulfa, Anandaru Padmonurcahyo, and Adinda Zahrah Salsabila. "Explaining the Forms of Generation Z's Political Engagement: A Study on Generation Z in Semarang, Indonesia." *Simulacra* 5, no. 2 (November 24, 2022): 99–112.

- Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Syukri Asy'ari. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 631–662.
- Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu Dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1, no. 4 (July 20, 2022): 288–301.
- Elviandri, E. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (June 3, 2019): 252–266.
- Fatiha, Alifia Silvi, Soeharjoto, and Wahyuningsih Santosa. "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (January 26, 2022): 345–352.
- Harahap, Dessy Agustina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Daerah." *Jurnal Mercatoria* 10, no. 1 (August 28, 2017): 10.
- Hasibuan, Syaiful Asmi. "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (May 4, 2023): 602–609.
- M. Fahmi Muwahid. "Pengawasan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemilihan Umum 2024 Pasca Dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (January 26, 2024): 202–208.
- Marbun, SF. "Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. 10 (1998): 69–77.
- Nazmi, Didi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (September 1, 2023): 53–62.

- Nuff, Diana Nur Febriani Mariyam Mc, and Sulaksono. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Peraturan Kampanye Di Lingkungan Sekolah Dan Perguruan Tinggi." *NOVUM: JURNAL HUKUM* (June 13, 2024): 507–516.
- Nugraha, Alfajar, and Atika Mulyandari. "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyash." *Mazahib* 15, no. 2 (December 28, 2016): 208–237.
- Perdana, Gema. "Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (September 2, 2019): 109–128.
- Prayogo, R. Tony. "Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Islam" (2015): 1–34.
- Saifuddin. "Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia." *AL-ADALAH* 14, no. 2 (2017): 461.
- Samud. "Hukum Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Hadis." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 6, no. 02 (December 31, 2018): 315–332.
- Saputra, Azhes Melodi, Nur Hidayat Sardini, and Rina Martini. "Netralitas Birokrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018." *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 1 (December 2014): 591–609.
- Siregar, Hamka. "Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Adalah* 12, no. 4 (December 2015): 715–728.
- Siri, Hasnani. "Abu Bakar: Fungsi Kekhalifahan Dan Kebijaksanaannya Memerangi Kaum Murtad." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (July 2017): 170–183.
- Sutiani, Wayan. "Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang. No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 7, no. 2 (July 29, 2024): 15–27.
- Yuniningsih, Tri. "Fenomena Pemilihan Kepala Daerah Dan Permasalahannya." *FORUM* 41, no. 1 (2014): 34–41.

Zulkarnaini. “Memilih Pemimpin Menurut Al-Qur’an Dan Sunnah.” *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (2018): 61–70.

Skripsi

Amin. “Netralitas Birokrat Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam Pemilukada Di Kota Masakar Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2012.” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2016.

Farikhah, Jihan. “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kota Semarang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

Maharani, Fitriana. “Penyelenggaraan Kampanye Di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasca Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024.

Sudirman, Sunarti. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dikota Parepare.” Skripsi, Universitas Hasanudin, 2018.

Wahyuni, Rizki. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada 2020 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Yamin, Halwan Muhammad. “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar.” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013.

Tesis

Watunglawar, Matias Neis. “Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” Tesis, Universitas Jember, 2015.

Purba, Laura Astrid H. “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.” Tesis, Univeristas Indonesia, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUNDANG-UNDANG-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tanggal 20 Agustus 2024.

Website

Ani. "MUI Luruskan Soal Fatwa Golput Haram." *CNN Indonesia*, March 28, 2019. Accessed June 2, 2025.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190328113845-32-381395/mui-luruskan-soal-fatwa-golput-haram>.

DA, Ady Thea. "Rancangan Peraturan KPU Adopsi Putusan MK Soal Kampanye Di Kampus." *Hukumonline.Com*, August 26, 2024. Accessed January 28, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/rancangan-peraturan-kpu-adopsi-putusan-mk-soal-kampanye-di-kampus-lt66cc6d8b3f44e/?page=all>.

- Joharsoyo, Yohanes Maharso. "Terima 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Di Pilkada 2024, Begini Respons Bawaslu." *Tempo*. Jakarta Pusat, March 13, 2024. Accessed January 29, 2025. <https://www.tempo.co/cekfakta/terima-400-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-di-pilkada-2024-begini-respons-bawaslu-8692>.
- KASN. "KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024." *Kasn.Go.Id*, 2024. Accessed January 11, 2025. <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>.
- . "Tenaga Pendidik Dan Kampus Wajib Jaga Nilai Kebenaran, Tidak Partisan, Dan Tidak Berpihak Warna Politik." *Kasn.Go.Id*, 2023. Accessed January 11, 2025. <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/tenaga-pendidik-dan-kampus-wajib-jaga-nilai-kebenaran-tidak-partisan-dan-tidak-berpihak-warna-politik>.
- Komisi Pemilihan Umum. "Pilkada 2024: KPU Sebagai Regulator Dan Penyelenggara Pemilu Yang Independen." *KPU*, April 26, 2025. Accessed January 29, 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/14244/PILKADA-2024-KPU-Sebagai-Regulator-dan-Penyelenggara-Pemilu-yang-Independen>.
- Polpum Kemendagri. "Pakar Pendidikan Kritik Putusan MK Bolehkan Kampanye Di Sekolah-Kampus." *Polpum.Kemendagri.Go.Id*. Jakarta, 2023. Accessed January 12, 2025. <https://polpum.kemendagri.go.id/berita-detail/1706>.
- Rachmalia, Mira. "Kapan Pilkada 2024 Digelar? Ini Jadwal Hingga Tahapan Pelaksanaan." *detikJatim*. Surabaya, October 9, 2024, Pilkada edition. Accessed November 19, 2024. <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7579408/kapan-pilkada-2024-digelar-ini-jadwal-hingga-tahapan-pelaksanaan>.
- Raharusun, Anthon. "Pilkada Serentak Dan Penguatan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Perhimpunan Advokat Indonesia*, October 24, 2017. Accessed January 28, 2025. <https://www.peradi.or.id/>.

- Ramadhan, Muhammad Nur. "Pertaruhan Izin Kampanye Pemilu Di Tempat Pendidikan." *Pshk.or.Id*, 2023. Accessed January 12, 2025.
<https://pshk.or.id/blog-id/pertaruhan-izin-kampanye-pemilu-di-tempat-pendidikan/>.
- Satryo, Ahmad. "KPU: Larangan Kampanye Di SLTA Masuk PKPU Terbaru." *Republik Merdeka*, September 25, 2023. Accessed January 28, 2025.
<https://rmol.id/politik/read/2023/09/25/590538/kpu-larangan-kampanye-di-sлта-masuk-pkpu-terbaru>.
- Yamin, Halwan Muhammad. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013.
- Yulianti, Cicin. "FSGI Kritik Putusan MK Izinkan Kampanye Di Lembaga Pendidikan: Sekolah Ruang Netral." *detikEdu*. Jakarta, 2023. Accessed January 12, 2025. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6887530/fsgi-kritik-putusan-mk-izinkan-kampanye-di-lembaga-pendidikan-sekolah-ruang-netral>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A